

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1. Latar Belakang Masalah

Desa merupakan kesatuan otonom dan memiliki hak dan kewajiban untuk mengatur rumah tangga sendiri. Berdasarkan Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Desa tidak lagi merupakan level administrasi dan menjadi bawahan daerah, melainkan menjadi *independent community*, yang berarti masyarakatnya berhak berbicara atas kepentingan sendiri dan bukan kepentingan dari pemerintah atas pemerintahan bawah. Undang Undang nomor 6 Tahun 2014 telah di sah kan dalam Sidang Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia pada tanggal 18 desember 2013, setelah menempuh perjalanan hampir 7 tahun lamanya ( 2007-2013). Seluruh komponen bangsa menyambut sebagai kemenangan besar. Sebab, Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menjadi bukti komitmen Pemerintah Indonesia dan anggota DPR-RI untuk melindungi dan memperdayakan desa agar menjadi lebih mandiri, kuat dan demokratis sehingga dapat menciptakan landasan yang kokoh dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera.

Dalam era otonomi daerah saat ini, desa di berikan kewenangan yang sangat luas dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat. Pentingnya peraturan desa bertujuan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat desa, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Ketika diberlakukkannya Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa di Indonesia, sebagian pihak telah banyak memberikan apresiasi kepada pemerintah pusat terhadap perkembangan otonomi desa yang sebelumnya. Sekaligus dengan Undang

Undang Nomor 6 Tahun 2014 ini nantinya desa desa di indonesia mempunyai masa depan yang lebih baik pengaturannya dari pada Undang Undnag sebelumnya yaitu : Undnag Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang desa, Undang Undang Nomor 222 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undnag Undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah termasuk di dalamnya mengatur tentang desa desa di indonesia.

Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Memiliki sumber dana yang cukup besar untuk kemandirian masyarakat desa. Dana tersebut berasal dari 7 sumber pendapatan yaitu : APBN, Alokasi Dana Desa (ADD), bagi hasil, pajak dan retribusi, bantuan keuangan dari Provinsi / kabupaten dan Kota, hibah yang sah dan tidak mengikat. Jika di kelola dengan baik dan benar maka desa akan menjapatkan dana lebih besar dari 2,5 Milyar Rupiah.

Berlakunya Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pemerintah banyak melakukan pembangunan di desa yang berguna untuk memandirikan dan mensejahterahkan masyarakat. Pembangunan ini di lakukan oleh pemerintah Desa dengan keberanian mengkontruksi pembangunan dari bawah atau *bottom up*. Masyarakat disini harus di beri kepercayaan yang baik sehingga desa bisa secara mandiri dapat melakukan pembangunan yang konsisten dan berkelanjutan. Hal ini mengingatkan karena banyak persoalan yang ada di indonesia, terutama dari lapisan masyarakat yang ada di pedesaan. Permasalahan yang terjadi di pedesaan antara lain seperti pengangguran, gizi buruk, dan kemiskinan.

Kemiskinan merupakan masalah kompleks dan bukan lagi di pahami hanya sekedar ketidak mampuan secara ekonomi tetapi juga kegagalan dalam memenuhi hak dasar dan perbedaan perlakuan bagi seorang atau sekelompok orang dalam menjalani kehidupan secara bermartabat. Hak hak dasar yang di akui secara umum ialah meliputi terpenuhnya kebutuhan pangan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, perumahan, air bersih, pertanahan,

sumber daya alam, dan lingkungan hidup, rasa aman dari perlakuan atau ancaman tindak kekerasan dan hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial politik, baik bagi perempuan maupun laki laki (Aneta, 2010).

Kemiskinan di Indonesia sudah menjadi persoalan utama bagi bangsa. Kondisi kemiskinan terjadi dalam berbagai bidang seperti sosial, ekonomi, dan pangan. Kemiskinan ditandai dengan kerentanan, ketidak berdayaan, keterisolasi dan ketidak mampuan seseorang dalam menyampaikan aspirasi (Tantowi, 2010). Berdasarkan hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) yang dilakukan Badan Pusat Statistik (BPS), Jumlah persentase penduduk Indonesia yang hidup di bawah garis kemiskinan mengalami penurunan dari bulan maret 2016 sebesar 28,01 jiwa atau 10,80% dibandingkan dengan bulan september 2016 sebesar 127,76 jiwa atau 10,70 %. Sedangkan pada tahun 2017 jumlah penduduk miskin di Indonesia juga mengalami penurunan pada bulan maret 2017 sebesar 27,77 jiwa atau 10,64% dibandingkan dengan bulan september 2017 sebesar 26,58 jiwa atau 10,12%, pada tahun 2016 dan 2017 masyarakat miskin mengalami penurunan

Pada hasil Survei Sosial Ekonomi yang dilakukan Badan Pusat Statistika (BPS) penduduk miskin di perkotaan di Indonesia tahun 2016 pada bulan maret sebesar 7,79% dibandingkan dengan bulan september 7,73%. Sedangkan di tahun 2017 penduduk miskin di perkotaan di Indonesia pada bulan maret sebesar 7,72%, dibandingkan dengan bulan september sebesar 7,26%. Di lihat dari data di atas jumlah penduduk miskin di perkotaan di Indonesia pada tahun 2016-2017 mengalami penurunan persentasi jumlah penduduk miskin.

Jumlah penduduk miskin di pedesaan di Indonesia menurut Survei Sosial Ekonomi yang dilakukan Badan Pusat Statistika (BPS) tahun 2016 pada bulan maret sebesar 14,11% dibandingkan dengan bulan september sebesar 13,96%. Sedangkan di tahun 2017 jumlah penduduk miskin di pedesaan di Indonesia pada bulan maret sebesar 13,63%, dan di

bandingkan pada bulan september sebesar 13,47%. Di lihat dari data di atas jumlah penduduk miskin di pedesaan di Indonesia pada tahun 2016-2017 mengalami penurunan persentasi jumlah penduduk miskin.

Perkembangan kemiskinan di indonesia sejak era reformasi bersifat *fluktuatif*. Maka pemerintah mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan dengan membentuk Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) yang di perkuat dengan Peraturan presiden Nomor 166 Tahun 2014 Tentang program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan. TNP2K ialah organisasi yang di bentuk sebagai wadah koordinasi lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan di tingkat pusat untuk melakukan percepatan penanggulangan kemiskinan. Untuk meninjak lanjuti Perpes tersebut maka Menteri Dalam Negeri mengeluarkan Peraturan Nomor 42 Tahun 2010 Tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) provinsi maupun kabupaten kota.

Penanggulangan kemiskinan ialah kebijakan dan program pemerintah pusat serta pemerintah daerah yang dilakukan secara sistematis, terencana dan bersinergi dengan dunia usaha dan masyarakat untuk mengurangi jumlah penduduk miskin dalam rangka meningkatkan derajat kesejahteraan rakyat. Untuk menaggulangi kemiskinan di indonesia, Pemerintah harus merumuskan beberapa kebijakan dan program. Program program penanggulangan kemiskinan di indonesia tersebar dan dilaksanakan oleh beberapa kementrian, sedangkan pemerintah daerah dilaksanakan oleh beberapa Satuan Kerja Perangkat Dearah (SKPD).

Kecamatan Pasir Penyu Kabupaten Indragiri Hulu memiliki 8 desa, berikut tabel di bawah 8 desa dengan jumlah BPNT / RASTRA dalam bentuk Kepala Keluarga (KK):

**Tabel 1.1**

**Data BPNT / RASTRA Kecamatan Pasir Penyu 2017**

NO	NAMA DESA	BPNT / RASTRA		
		NON PKH (KK)	PKH (KK)	NON PKH & PKH (KK)
1	Pasir Keranji	17	51	68
2	Candirejo	21	77	98
3	Air Molek II	6	49	55
4	Lembah Dusun Gading	4	23	27
5	Petalongan	5	84	89
6	Batuh Gajah	6	63	69
7	Jati Rejo	3	50	53
8	Serumpun Jaya	9	43	52

Sumber : Pemerintahan Kecamatan Pasir Penyu Tahun 2019

Dari Tabel 1.1 dapat di lihat dari jumlah Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dan Beras Sejahterah (RASTRA) dalam jumlah Kepala Keluarga (KK) dari ke delapa desa itu Desa Candirejo yang memiliki jumlah terbanyak dari hasil penjumlahan Program Keluarga Harapan(PKH) dan non Program Keluarga Harapan (PKH) yaitu sebesar 98 KK di tahun 2017.

**Tabel 1.2**

**Data BPNT / RASTRA dan Dana Desa di Desa Candirejo Tahun 2016-2017**

Tahun	BPNT / RASTRA			Dana Desa
	Non PKH (KK)	PKH (KK)	NON PKH & PKH (KK)	
2016	19	73	92	1.226,401,715
2017	21	77	98	1.466,130,714

Sumber : Pemerintahan Desa Candirejo Tahun 2019

Dari tabel 1.2 di atas dapat dilihat bahwa Desa candirejo pada tahun 2016 dan 2017 mengalami kenaikan dalam jumlah kemiskinan. Desa Candirejo memiliki penduduk paling banyak dari ke delapan desa yang ada di Kecamatan Pasir Penyu pada tahun 2016 jumlah penduduk desa Candirejo sebesar 6.248 jiwa, dan pada tahun 2017 jumlah penduduk desa

Candirejo mengalami kenaikan sebesar 6.370 jiwa, dan Desa candirejo juga yang memiliki jumlah penduduk miskin paling banyak se Kecamatan Pasir penyu pada tahun 2016 jumlah penduduk miskin sebesar 92 KK, dan pada tahun 2017 mengalami kenaikan jumlah penduduk miskin menjadi 98 KK..

Desa Candirejo di lihat dari APBDes nya mendapat dana pada tahun 2016 sebesar Rp, 1.226,401,715,-. sedang kan pada tahun 2017 sebesar Rp, 1.466,130,714,-. Di lihat dari 2016 dan 2017 Desa Candirejo medapat kenaikan dana. Seharus nya dana yang bertambah itu dapat mengurangi angka kemiskinan di Desa Candirejo, bukan dana yang bertambah jumlah penduduk miskin bertambah pula. Dana yang sebesar itu dan bertambah seharusnya pemerintah Desa Candirejo bisa mengurangi angka kemiskinan di Desa Candirijo melalui prograam pembinaan masyarakat dan pemberdayaan masyarakat.

Penjelasan di atas membuat peneliti tertarik untuk meneliti bagaimana peran pemerintah desa dalam menanggulangi angka kemiskinan di Desa Candirejo. karena Desa Candirejo mendapatkan Penghargaan dari Bupati Indragiri Hulu yaitu Penghargaan Kesejahteraan masyarakat. Penjelasan di atas menyatakan bahwa Desa Candirejo angka kemiskinnannya paling besar dari pada ke delapan desa yang ada di Kecamatan Pasir Penyu.

## **1.2. Rumusan Masalah**

Bagaimana peran pemerintah desa dalam mengatasi angka kemiskinan di Desa Candirejo?

## **1.3. Tujuan Penelitian**

Tujuan ini ialah untuk mengetahui peran pemerintahan desa dalam menanggulangi kemiskinan di Desa Candirejo, Kabupaten Indragiri Hulu

## **1.4. Manfaat Penelitian**

### **a. Manfaat teoritis**

1. Memberikan tambahan wawasan dalam perkembangan ilmu pengetahuan serta dapat meningkatkan pengetahuan penulis dalam aplikasi dan teori.

2. Diharapkan dapat menambah referensi kepustakaan bagi mahasiswa

**b. Manfaat Praktis**

1. Sebagai acuan bagi pemerintahan desa tentang keberhasilan dalam menanggulangi kemiskinan.
2. Mengetahui apakah berhasil program program yang di buat oleh pemerintahan Desa.

**1.5. Studi Terdahulu**

Mengambil studi terdahulu, berguna untuk membandingkan penelitian satu dengan penelitian lain. Ada 10 literatur di tabel di bawah ini :

1. Nama Penulis : P Saragi Tahun 2015 dengan judul penelitian “Analisis pemerintah dalam pengentasan kemiskinan di Daerah Istimewah Yogyakarta.” Penelitian yang di lakukan P Saragi ini Sudah berupaya pemerintahannya akan tetapi keterbatasan finansial dan ketidak berdayaan penduduk itu membuat sulitnya pemberantasan kemiskinan.
2. Nama Penulis : Nugraha Utama Sudarsana Tahun 2015 dengan judul penelitian “Rencana Partisipasi dalam Rangka Pengentasan Kemiskinan.” Penelitian yang di lakukan Nugraha Utama Sudarsana ini dalam penanggulangan kemiskinan menggunakan program desa percontohan penanggulangan kemiskinan dan kerawangan pangan dengan melibatkan berbagai pihak. Penelitian ini mendeskripsikan dan menganalisis perencanaan program tersebut beserta keterlibatan masyarakat didalamnya termaksud factor-faktor pendukung dan penghambat partisipasi masyarakat. Perencanaan program didahului dengan identifikasi kondisi dan kebutuhan wilayah dan masyarakat sasaran. Perencanaan program desa percontohan pengurangan kemiskinan dan kerawangan pangan di Daerah Istimewa Yogyakarta lebih cenderung menggunakan pendekatan top-down

dan teknokratis. Pendekatan partisipatif belum sepenuhnya diadopsi mengingat masyarakat miskin sebagai sasaran program belum dilibatkan dalam penyusunan rencana. Pendekatan teknokratis ditandai dengan digunakannya serangkaian metode ilmiah yaitu survey dan analisis untuk menentukan kegiatan yang akan dilaksanakan. Partisipasi masyarakat dalam perencanaan program didorong oleh factor peran pemangku kegiatan, kesadaran masyarakat serta system social dalam masyarakat. Partisipasi masyarakat dihambat oleh factor jenis pekerjaan dan kepedudukan dalam masyarakat.

3. Nama Penulis : Marliya Tahun 2016 dengan judul penelitian “Implementasi Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan Di Kota Palu.” Penelitian yang di lakukan Marliya Berdasarkan hasil penellitian program penanggulangan kemiskinan di kota Palu bertujuan untuk melakukan pemberdayaan kepada masyarakat penerima bantuan didasarkan pada aspek yang dibahas dalam penelitian. Terdapat empat aspek yang menjadi focus kajian yakni komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Hasil penelitian menggambarkan kebijakan penanggulangan kemiskinan dengan menelusuri aspek komunikasi dalam penelitian belum berjalan secara 13 baik seperti yang diharapkan demikian juga pada aspek disposisi, struktur birokrasi dan sumber daya. Factor penghambat dalam program bantuan raskin kepada masyarakat miskin kota Palu adalah pada aspek disposisi atau sikap dari pelaksana kebijakan yang tidak transparan dalam proses pemberian bantuan kepada masyarakat miskin.
4. Nama Penulis : Faisal dan Erman tahun 2014 dengan judul penelitian “Kebijakan Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan(TKPK) Kabupaten Kepulauan Meranti 2011-2012).” Penelitian yang di lakukan Faisal dan Erman ini diketahui bahwa kemiskinan di Kabupaten



Meranti diakibatkan oleh berbagai factor baik itu sandang, pangan, papan, ataupun infrastruktur dan budaya. Selain itu kebijakan penanggulangan Kemiskinan yang dibuat TKPK Kabupaten Kepulauan Meranti dapat dikatakan baik dan sesuai dengan instrumen penanggulangan kemiskinan yang tetapkan TNP2K. Namun dalam mengintervensi target bidang penanggulangan, TKPK Kabupaten Kepulauan Meranti hanya secara 14 menganalisa dari hasil pemantauan program yang dilakukan, kemudian diserahkan kepada SKPD tim koordinasi penanggulangan kemiskinan di daerah ini tidak melakukan tindakan lebih lanjut, tidak adanya rumusan ataupun dokumen strategi dalam penaggulangan kemiskinan daerah. Selain itu terdapat factor penghambat dalam upaya penanggulanagn kemiskinan, diantaranya masslah komunikasi yang diakibatkan oleh letak geografi kabupaten Meranti yang terdapat banyak pulau, dan masih minimnya jumlah staf dan fasilitas penyeleggaraan pemerintah yang masih minim belum adanya dokumen strategis penaggulanagan kemiskinan Daerah (SPKD ) selain itu struktur organisasi belum tertata dengan baik, berdasarkan hal tersebut dapat mempengaruhi kebijakan yang ditetapka TKPK dalam upaya penaggulangan kemiskinan.

5. Nama Penulis : Motic Deviano Novandric Tahun 2015 dengan judul penelitian “Implementasi Kebijakan Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Strategi Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Melalui Pelaksanaan Desa Model di Kelurahan Mondokan Kecamatan Tuban Kabupaten Tuban).” Penelitian yang di lakukan Motic Deviano Novandric ini Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa implementasi strategi percepatan penanggulangan kemiskinan melalui pelaksanaan Desa Model di Kelurahan Mondokan Kecamatan Tuban Kabupaten Tuban sebagai salah satu lokasi yang ditetapkan sebagai Desa Model jika dilihat dari Model implementasi S.Smith yang

melihat pada 4 aspek dalam implementasi yaitu idealized policy, target group, implementing organization dan environment factors. Pada faktor Idealized Policy menilai bahwa komunikasi yang terjalin antar organisasi hanya melalui Musrenbang, selain itu kegiatan-kegiatan pelaksanaan yang terdiri atas tiga tahapan yaitu tahap persiapan kegiatan yang didalamnya mencakup identifikasi sasaran dan pembentukan kelompok masyarakat penerima bantuan. Peran pelaksana kebijakan yang seharusnya memberikan pemahaman dengan melakukan sosialisasi kepada masyarakat untuk memberikan pemahaman tujuan diberikannya bantuan ternak masih kurang dan kurangnya pengawasan serta sikap tegas pemerintah yang tidak memberikan sanksi kepada masyarakat yang melanggar aturan menjual bantuan ternak juga menjadi penyebab kurang berhasilnya implementasi penanggulangan kemiskinan melalui Desa Model.

6. Nama Penulis : Arius Jonaidi Tahun 2012 dengan judul penelitian “Analisis Pertumbuhan Ekonomi dan Kemiskinan di Indonesia.” Penelitian yang dilakukan Arius Jonaidi ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh dua arah antara pertumbuhan ekonomi dan kemiskinan di Indonesia: (1) Pengaruh pengangguran, kemiskinan, investasi dan pertumbuhan ekonomi. (2) Pengaruh harapan hidup, melek huruf, investasi pendidikan dan pertumbuhan ekonomi terhadap kemiskinan. Studi ini menggunakan data panel atau cross-time series series dengan data time series dari tahun 2005-2009, dan persentasenya adalah bahwa ada 33 provinsi di Indonesia. Metode yang digunakan adalah analisis deskriptif dan analisis ekonometrik dengan menggunakan model persamaan simultan (model persamaan simultan). Hasilnya menunjukkan bahwa ada interaksi dua arah antara pertumbuhan ekonomi dan kemiskinan. Efek signifikan pada pertumbuhan ekonomi dalam pengentasan kemiskinan, terutama di daerah

pedesaan ada banyak kantong kemiskinan. Kebalikan dari kemiskinan juga berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Dengan peningkatan akses terhadap modal, kualitas pendidikan (melek huruf dan peningkatan lama pendidikan) dan kesehatan (peningkatan harapan hidup) orang miskin dapat meningkatkan produktivitas mereka dalam usaha 17 selama periode 2000-2009. Tingkat pengangguran, dan investasi signifikan pada pertumbuhan ekonomi. Selanjutnya, investasi investasi dalam negeri dan luar negeri, harapan hidup, melek huruf dan sekolah lebih lama berpengaruh signifikan terhadap jumlah penduduk miskin. Berdasarkan temuan ini, kebijakan yang harus dilakukan pemerintah adalah memacu pertumbuhan ekonomi melalui perluasan investasi terutama di bidang pertanian (agribisnis dan agroindustri) di daerah pedesaan dimana banyak orang miskin bergantung.

7. Nama Penulis : Taurusman Situmeang Tahun 2013 dengan judul penelitian “Proyek penanggulangan kebijakan penanganan kemiskina di perkotaan (studi Implementasi Kebijakan Proyek Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan di Desa Jatikerto Kecamatan Kromengan Kabupaten Malang).” Penelitian yang di lakukan Taurusman Situmeang ini adanya Faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan program P2KP di Desa Jatikerto Kecamatan Kromengan Kabupaten Malang: a. Faktor pendukung yang ada adalah: (1) dukungan aparat desa, (2) adanya azas keterbukaan dan program P2KP, dan (3) respon masyarakat terhadap program P2KP. b. Faktor penghambat adalah: (1) rendahnya kepercayaan masyarakat, terutama pada awal sosialisasi, (2) rendahnya kinerja Faskel, yaitu kurangnya wawasan, dan (3) rendahnya tanggung jawab KSM.
8. Nama Penulis : Asiah Hamzah Tahun 2012 dengan judul penelitian “Kebijakan penanggulangan kemiskinan dan kelaparan di Indonesia : Realita dan

Pembelajaran.” Penelitian yang di lakukan Asiah Hamzah ini menjelaskan bahwa untuk melaksanakan pengentasan kelaparan ataupun kemiskinan yang terjadi di Indonesia perlu dilakuknya Multisector dengan adanya bantuan proses dari berbagai pihak. Dalam menangani permasalahan ini harus dilakukan penanganan yang sungguh-sungguh. Pengentasan kemiskinan yang pemerintah di Indonesia harus lebih serius dalam menjalankan program pengentasan kelaparan dan kemiskinan dengan bantuan program berbasis pemberdayaan masyarakat, serta focus terhadap pelaksanaan strategi kemandirian pangan, berupa kemandirian pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, dan pemerintah desa untuk mengembangkan dan memelihara cadangan pangannya masing-masing.

9. Nama Penulis : Emmy Latifa Tahun 2011 dengan judul penelitian “Harmonisasi kebijakan pengentasan kemiskinan di Indonesia yang berorientasi pada MDGs.” Penelitian yang di lakukan Emmy Latifa ini menjelaskan bahwa kebijakan pengentasan kemiskinan belum sesuai dengan MGDs. Belum sesuai atau harmonisnya diakibatkan oleh perbedaan dalam arti kemiskinan. Apabila dikaji dengan cermat dalam berbagai peraturan perundangundangan, adanya perbedaan antara peraturan dengan yang lainnya baik secara vertical maupun horizontal. Oleh sebab itu perlu dilakukan redefinisi kemiskinan. Langkah selanjutnya diikuti dengan peraturan dan sasaran dalam satu dokumen peraturan yang sesuai dengan pengentasan kemiskinan yang merupakan program unggulan dari pemerintah.
10. Nama Penulis : I Wayan Rusastra Tahun 2011 dengan judul penelitian “Reorientasi Paradigma dan Strategis Pengentasan Kemiskinan Dalam Mengatasi Dampak Krisis Ekonomi Global.” Penelitian yang di lakukan I Wayan Rusastra ini pemerintah dan masyarakat dapat mengalokasikan sumber daya pembangunan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi sesuai dengan kapasitas perekonomian

nasional melalui pengembangan infrastruktur, investasi, dan iklim ekonomi yang kondusif. Optimalisasi alokasi dana pembangunan untuk program pengentasan kemiskinan dan pertumbuhan ekonomi, dengan tujuan utama peningkatan pendapatan penduduk miskin, memegang peranan sentral. Komplementasi pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan efektivitas program pengentasan kemiskinan, didukung dengan integrasi ekonomi desa kota, akan dapat menjamin efektivitas dan efisiensi pemanfaatan sumber daya ekonomi dan mempercepat pengentasan kemiskinan di perdesaan dan secara nasional.

**Tabel 1.3**  
**Studi Terdahulu**

<b>NO</b>	<b>Nama Penulis</b>	<b>Judul penelitian</b>	<b>Hasil Penelitian</b>
1	P Saragi (2015)	Analisis pemerintah dalam pengentasan kemiskinan di Daerah Istimewah Yogyakarta.	Sudah berupaya pemerintahannya akan tetapi keterbatasan finansial dan ketidak berdayaan penduduk itu membuat sulitnya pemberantasan kemiskinan
2	Nugraha Utama Sudarsana (2015)	Rencana Partisipasi dalam Rangka Pengentasan Kemiskinan	Hasil penelitian ini dalam penanggulangan kemiskinan menggunakan program desa percontohan penanggulangan kemiskinan dan kerawangan pangan dengan melibatkan berbagai pihak. Penelitian ini mendeskripsikan dan menganalisis perencanaan program tersebut beserta keterlibatan masyarakat didalamnya termaksud factor-faktor pendukung dan penghambat partisipasi masyarakat. Perencanaan program didahului dengan identifikasi kondisi dan kebutuhan wilayah dan masyarakat sasaran. Perencanaan program desa percontohan pengurangan

			<p>kemiskinan dan kerawanan pangan di Daerah Istimewa Yogyakarta lebih cenderung menggunakan pendekatan top-down dan teknokratis. Pendekatan partisipatif belum sepenuhnya diadopsi mengingat masyarakat miskin sebagai sasaran program belum dilibatkan dalam penyusunan rencana. Pendekatan teknokratis ditandai dengan digunakannya serangkaian metode ilmiah yaitu survey dan analisis untuk menentukan kegiatan yang akan dilaksanakan. Partisipasi masyarakat dalam perencanaan program didorong oleh factor peran pemangku kegiatan, kesadaran masyarakat serta system social dalam masyarakat. Partisipasi masyarakat dihambat oleh factor jenis pekerjaan dan kedudukan dalam masyarakat.</p>
3	Marliya (2016)	Implementasi Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan Di Kota Palu	<p>Berdasarkan hasil penellitian program penanggulangan kemiskinan di kota Palu bertujuan untuk melakukan pemberdayaan kepada masyarakat penerima bantuan didasarkan pada aspek yang dibahas dalam penelitian. Terdapat empat aspek yang menjadi focus kajian yakni komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Hasil penelitian menggambarkan kebijakan penanggulangan kemiskinan dengan menelusuri aspek komunikasi dalam penelitian belum berjalan secara 13 baik seperti yang diharapkan</p>

			demikian juga pada aspek disposisi, struktur birokrasi dan sumber daya. Factor penghambat dalam program bantuan raskin kepada masyarakat miskin kota Palu adalah pada aspek disposisi atau sikap dari pelaksana kebijakan yang tidak transparan dalam proses pemberian bantuan kepada masyarakat miskin
4	Faisal dan Erman (2014)	Kebijakan Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan(TKPK) Kabupaten Kepulauan Meranti 2011-2012)	Hasil penelitian ini diketahui bahwa kemiskinan di Kabupaten Meranti diakibatkan oleh berbagai factor baik itu sandang, pangan, papan, ataupun infrastruktur dan budaya. Selain itu kebijakan penanggulangan Kemiskinan yang dibuat TKPK Kabupaten Kepulauan Meranti dapat dikatakan baik dan sesuai dengan instrumen penanggulangan kemiskinan yang ditetapkan TNP2K. Namun dalam mengintervensi target bidang penanggulangan, TKPK Kabupaten Kepulauan Meranti hanya secara 14 menganalisa dari hasil pemantauan program yang dilakukan, kemudian diserahkan kepada SKPD tim koordinasi penanggulangan kemiskinan di daerah ini tidak melakukan tindakan lebih lanjut, tidak adanya rumusan ataupun dokumen strategi dalam penaggulangan kemiskinan daerah. Selain itu terdapat factor penghambat dalam upaya penanggulanagn kemiskinan, diantaranya masalah komunikasi yang diakibatkan oleh letak geografi kabupaten Meranti

			<p>yang terdapat banyak pulau, dan masih minimnya jumlah staf dan fasilitas penyeleggaraan pemerintah yang masih minim belum adanya dokumen strategis penaggulanagan kemiskinan Daerah (SPKD ) selain itu struktur organisasi belum tertata dengan baik, berdasarkan hal tersebut dapat mempengaruhi kebijakan yang ditetapkan TKPK dalam upaya penaggulanagan kemiskinan</p>
5	Motic Deviano Novandric (2015)	Implementasi Kebijakan Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Stategi Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Melalui Pelaksanaan Desa Model di Kelurahan Mondokan Kecamatan Tuban Kabupaten Tuban)	<p>Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa implementasi strategi percepatan penanggulangan kemiskinan melalui pelaksanaan Desa Model di Kelurahan Mondokan Kecamatan Tuban Kabupaten Tuban sebagai salah satu lokasi yang ditetapkan sebagai Desa Model jika dilihat dari Model implementasi S.Smith yang melihat pada 4 aspek dalam implementasi yaitu idealized policy, target group, implementing organization dan environment factors. Pada faktor Idealized Policy menilai bahwa komunikasi yang terjalin antar organisasi hanya melalui Musrenbang, selain itu kegiatan-kegiatan pelaksanaan yang terdiri atas tiga tahapan yaitu tahap persiapan kegiatan yang didalamnya mencakup identifikasi sasaran dan pembentukan kelompok masyarakat penerima bantuan. Peran pelaksana kebijakan yang seharusnya memberikan pemahaman dengan melakukan sosialisasi</p>



			<p>kepada masyarakat untuk memberikan pemahaman tujuan diberikannya bantuan ternak masih kurang dan kurangnya pengawasan serta sikap tegas pemerintah yang tidak memberikan sanksi kepada masyarakat yang melanggar aturan menjual bantuan ternak juga menjadi penyebab kurang berhasilnya implementasi penanggulangan kemiskinan melalui Desa Model.</p>
6	Arius Jonaidi (2012)	Analisis Pertumbuhan Ekonomi dan Kemiskinan di Indonesia	<p>Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh dua arah antara pertumbuhan ekonomi dan kemiskinan di Indonesia: (1) Pengaruh pengangguran, kemiskinan, investasi dan pertumbuhan ekonomi. (2) Pengaruh harapan hidup, melek huruf, investasi pendidikan dan pertumbuhan ekonomi terhadap kemiskinan. Studi ini menggunakan data panel atau cross-time series series dengan data time series dari tahun 2005-2009, dan persentasenya adalah bahwa ada 33 provinsi di Indonesia. Metode yang digunakan adalah analisis deskriptif dan analisis ekonometrik dengan menggunakan model persamaan simultan (model persamaan simultan). Hasilnya menunjukkan bahwa ada interaksi dua arah antara pertumbuhan ekonomi dan kemiskinan. Efek signifikan pada pertumbuhan ekonomi dalam pengentasan kemiskinan, terutama di daerah pedesaan ada banyak kantong kemiskinan. Kebalikan dari kemiskinan juga berpengaruh signifikan</p>

			<p>terhadap pertumbuhan ekonomi. Dengan peningkatan akses terhadap modal, kualitas pendidikan (melek huruf dan peningkatan lama pendidikan) dan kesehatan (peningkatan harapan hidup) orang miskin dapat meningkatkan produktivitas mereka dalam usaha 17 selama periode 2000-2009. Tingkat pengangguran, dan investasi signifikan pada pertumbuhan ekonomi. Selanjutnya, investasi investasi dalam negeri dan luar negeri, harapan hidup, melek huruf dan sekolah lebih lama berpengaruh signifikan terhadap jumlah penduduk miskin. Berdasarkan temuan ini, kebijakan yang harus dilakukan pemerintah adalah memacu pertumbuhan ekonomi melalui perluasan investasi terutama di bidang pertanian (agribisnis dan agroindustri) di daerah pedesaan dimana banyak orang miskin bergantung.</p>
7	Taurusman Situmean (2013)	Proyek penanggulangan kebijakan penanganan kemiskina di perkotaan ( studi Implementasi Kebijakan Proyek Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan di Desa Jatikerto Kecamatan Kromengan Kabupaten Malang)	<p>Hasil dalam penelitian ini adanya Faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan program P2KP di Desa Jatikerto Kecamatan Kromengan Kabupaten Malang:</p> <p>a. Faktor pendukung yang ada adalah:</p> <p>(1) dukungan aparat desa, (2) adanya azas keterbukaan dan program P2KP, dan (3) respon masyarakat terhadap program P2KP.</p> <p>b. Faktor penghambat adalah:</p> <p>(1) rendahnya kepercayaan masyarakat, terutama pada awal sosialisasi, (2)</p>

			rendahnya kinerja Faskel, yaitu kurangnya wawasan, dan (3) rendahnya tanggung jawab KSM.
8	Asiah hamzah (2012)	Kebijakan penanggulangan kemiskinan dan kelaparan di Indonesia : Realita dan Pembelajaran	<p>Penelitian ini menjelaskan bahwa untuk melaksanakan pengentasan kelaparan ataupun kemiskinan yang terjadi di Indonesia perlu dilakuknya Multisector dengan adanya bantuan proses dari berbagai pihak. Dalam menangani permasalahan ini harus dilakukan penanganan yang sungguh-sungguh. Pengentasan kemiskinan yang pemerintah di Indonesia harus lebih serius dalam menjalankan program pengentasan kelaparan dan kemiskinan dengan bantuan program berbasis pemberdayaan masyarakat, serta focus terhadap pelaksanaan strategi kemandirian pangan, berupa kemandirian pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, dan pemerintah desa untuk mengembangkan dan memelihara cadangan pangannya masing-masing.</p>
9	Emmy Latifa (2011)	Harmonisasi kebijakan pengentasan kemiskinan di Indonesia yang berorientasi pada MDGs.	<p>Dalam jurnal ini menjelaskan bahwa kebijakan pengentasan kemiskinan belum sesuai dengan MGDs. Belum sesuai atau harmonisnya diakibatkan oleh perbedaan dalam arti kemiskinan. Apabila dikaji dengan cermat dalam berbagai peraturan perundangundangan, adanya perbedaan antara peraturan dengan yang lainnya baik secara vertical maupun horizontal. Oleh sebab itu perlu dilakukan redifinisi</p>

			<p>kemiskinan. Langkah selanjutnya diikuti dengan peraturan dan sasaran dalam satu dokumen peraturan yang sesuai dengan pengentasan kemiskinan yang merupakan program unggulan dari pemerintah.</p>
10	I Wayan Rusastra (2011)	Reorientasi Paradigma dan Strategis Pengentasan Kemiskinan Dalam Mengatasi Dampak Krisis Ekonomi Global	<p>Hasil penelitian ini pemerintah dan masyarakat dapat mengalokasikan sumber daya pembangunan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi sesuai dengan kapasitas perekonomian nasional melalui pengembangan infrastruktur, investasi, dan iklim ekonomi yang kondusif. Optimalisasi alokasi dana pembangunan untuk program pengentasan kemiskinan dan pertumbuhan ekonomi, dengan tujuan utama peningkatan pendapatan penduduk miskin, memegang peranan sentral. Komplementasi pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan efektivitas program pengentasan kemiskinan, didukung dengan integrasi ekonomi desa kota, akan dapat menjamin efektivitas dan efisiensi pemanfaatan sumber daya ekonomi dan mempercepat pengentasan kemiskinan di perdesaan dan secara nasional.</p>

Penjelasan di atas membuat penulis ingin meneliti tentang peran pemerintahan Desa Candirejo dalam mengatasi kemiskinan. Bedanya dengan penelitian terdahulu adalah penulis ingin lebih menfokuskan pada peran pemerintah Desa Candirejo dalam mengatasi Kemiskinan tahun 2016 – 2017. Disini penulis menggunakan pendekatan kualitatif karena

ingin tau program apa saja yang di buat untuk mengatasi kemiskinan dan bagaimana peran pemerintahan Desa Candirejo dalam mengatasi kemiskinan.

## **1.6. Kerangka Dasar Teori**

### **1. Peran**

#### **A. Pengertian Peran**

Menurut Soekanto (1990) peranan ialah aspek yang dinamis dari kedudukan seseorang dan kerana kedudukan itulah seseorang melakukan tindakan atau gerakan perubahan yang dinamis, di mana dari usaha itu di harapkan akan terciptanya suatu keadaan atau hasil yang di inginkan. Tindakan tersebut di jalankan dengan memanfaatkan kewenangan, kekuasaan serta fasilitas yang di miliki karena kedudukannya. Definisi lain di ungkap oleh Poerwadarminta (1995) peran ialah tindakan yang di lakukan seseorang atau sekelompok orang dalam suatu peristiwa. Sedangkan Ndraha (1997) mengemukakan bahwa yang di maksud dengan peranan ialah aspek dinamis lembaga atau peranan mewakili tata institusional suatu lembaga (Putri, 2015)

Sedangkan menurut Edy Suhardono, makna dari kata peran dapat di jelaskan melalui berapa cara. Yang pertama, suatu penjelasan historis menyebutkan, konsep peran semula di pinjam dari kalangan drama atau teater yang hidup subur di zaman Yunani kuno atau Romawi. Dalam arti ini, peran menunjuk pada karakterisasi yang di sandang untuk di bawakan oleh seseorang aktor dalam sebuah pentas drama. Sedangkan yang ke dua, suatu penjelasan yang merujuk pada konotasi ilmu sosial, yang mengartikan peran sebagai suatu fungsi yang di bawakan seseorang ketika menduduki suatu karakterisasi (posisi) dalam Struktur sosial. Sedangkan yang ke tiga, suatu penjelasan yang bersifat operasional, yang menyebutkan bahwa peran seorang aktor ialah suatu batasan yang di rancang oleh aktor lain, yang kebetulan

sama sama berada dalam satu “penampilan / unjuk peran” (*role performance*). Hubungan antara pelaku (*aktor*) dan pasangan pelaku (*role partner*) bersifat saling terkait dan saling mengisi, karena konteks sosial, tak satu peran pun dapat berdiri sendiri tanpa yang lain (Susanto A. , 1983).

Tidak ada peran tanpa kedudukan, begitu pula sebaliknya. Sebagai mana halnya dengan kedudukan maka peran juga mempunyai arti bahwa manusia mempunyai macam macam peranan yang berasal dari pola pola pergaulan hidupnya. Hal ini mengandung arti bahwa peranan tersebut menentukan apa yang di perbuat oleh masyarakat dan sekaligus kesempatan kesempatan apa yang di berikan masyarakat kepadanya.

(Susanto A. , 1983) berpendapat bahwa peranan mencakup paling sedikit ada tiga hal yaitu :

- a. Peranan ialah meliputi sarana yang di hubungkan dengan posisi atau tempat seseorang di dalam masyarakat. Peranan dalam hal ini menempatkan rangkaian peraturan yang membimbing seseorang kedalam kehidupan bermasyarakat.
- b. Peranan ialah suatu konsep perihal apa yang dapat di lakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai masyarakat.
- c. Peranan juga dapat di katakan sebagai pelaku individu yang penting didalam struktur sosial.

## **B. Pelaksanaan Peran**

Berdasarkan pelaksanaannya menurut (Suyanto, 2006) dapat di bedakan menjadi dua yaitu :

- a. Peranan yang di harapkan (*expectec roles*) ialah cara ideal dalam pelaksanaan peranan menurut penilaian masyarakat. Masyarakat

menghendaki peranan yang di harapkan di laksanakan secermat cermatnya dan peranan ini tidak dapat di tawaar dan harus di laksanakan seperti yang di tentukan. Peranan jenis ini antara lain peranan hakim, peranan protekoler diplomatik, dan sebagainya.

- b. Peranan yang di sesuaikan (*actual roles*) ialah cara bagaimana sebenarnya peranan itu di jalankan. Peranan ini dilaksanakannya lebih luwes, dapat di sesuaikan dengan situasi dan kondisi tertentu. Peranan yang di sesuaikan mungkin tidak cocok dengan situasi setempat, tetapi kekurangan yang muncul dapat di anggap wajar oleh masyarakat.

### **C. Peranan Fungsi Pemerintah**

Peranan fungsi pemerintah secara umum seperti yang di kutip dari (Hidayat, 2013), secara umum pemerintah memiliki berbagai peranan yaitu sebagai berikut :

- a. Peranan Pengaturan (*Regulasi*)

Peranan fungsi pengaturan (*Regulasi*) merupakan fungsi pemerintah dalam membuat peraturan perundang undangan yang mengatur kehidupan bersama. Fungsi pengaturan ini di lakukan baik pada tingkat pemerintahan pusat mau pun pemerintahan daerah. Fungsi regulasi atau pengaturan ini terwujud dengan adanya lembaga legislative yang salah satu fungsinya ialah membuat peraturan perundang undangan. Namun di samping itu, fungsi pengaturan ini bisa juga berarti fungsi pengaturan yang dilakukan oleh lembaga lembaga pemerintahan baik lembaga legislative, eksekutif, maupun yudikatif, juga lembaga lembaga departemen maupun non departemen.

- b. Peranan Pemberdayaan (*Empowerment*)

Peranan fungsi pemberdayaan ini merupakan fungsi yang dilakukan oleh pemerintah untuk memberdayakan masyarakat, sehingga setiap elemen masyarakat dapat ikut berpartisipasi dalam kegiatan pembangunan dan pemerintahan. Fungsi pemberdayaan ini dilakukan dalam setiap aspek kehidupan baik ekonomi, politik, hukum, sosial, budaya dan yang lainnya. Pemberdayaan dari aspek politik ialah upaya penyadaran kepada masyarakat akan hak-hak dalam kewajibannya sebagai warga negara dan juga upaya-upaya yang dilakukan pemerintah untuk meningkatkan pengetahuan politik masyarakat melalui pendidikan politik. Pada prinsipnya, fungsi pemberdayaan ini merupakan upaya meningkatkan kemampuan masyarakat di segala bidang kehidupan.

c. Peranan Pelayanan

Dalam memberikan pelayanan ini juga berarti *civil service* maupun *public service*, hanya saja dalam *civil service* pasti dilaksanakan oleh pemerintah sementara *public service* bisa dikerjakan oleh pemerintah bekerja sama dengan swasta maupun dilaksanakan oleh pihak swasta sendiri. Dengan *civil service* dimaksudkan pelayanan yang diberikan kepada masyarakat sebagai warga negara tanpa memandang kelas sosial yang dimilikinya atau pun imbalan yang diberikan.

d. Peran Koordinasi

Menurut E.F.L Brech (2007), koordinasi adalah mengimbangi dan menggerakkan tim dengan memberikan lokasi kegiatan pekerjaan yang cocok dengan masing-masing dan menjaga agar kegiatan itu dilaksanakan dengan keselarasan yang semestinya di antara para anggota itu sendiri.



## **2. Pemerintah Desa**

### **1) Pemerintah Desa**

Pemerintahan Desa ialah penyelenggara dalam bidang pemerintahan dan kepentingan masyarakat umum yang bermukim di desa tersebut. Dalam sebuah desa itu memiliki sistem pemerintahan sendiri yaitu pemerintahan desa. pemerintahan desa di dalamnya ada kepala desa yang di bantu dengan perangkat desa sebagai unsur penyelenggara dalam pemerintahan desa.

Menurut (Supriadi, 2015) pemerintah desa merupakan simbol formal dari keseluruhan masyarakat desa. Menurut (Atmaja, 2016) pemerintah desa ialah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah desa dan badan permusyawaratan desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat. Menurut (Heriyanto, 2015) pemerintah desa merupakan organisasi dari penyelenggaraan pemerintahan desa yang terdiri atas :

#### **A. Kepala Desa**

Kepala Desa memiliki peran penting dalam pemerintahan desa untuk memberdayakan masyarakat desa. Pasal 26 Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Kepala Desa merupakan pimpinan dalam penyelenggaraan pemerintah desa, pelaksanaan dalam pembangunan untuk kemajuan desa, pembinaan dan pemberdayaan terhadap masyarakat desa. Kepala Desa juga memiliki kewenangan sebagai berikut :

- a. Memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa
- b. Mengangkat dan memberhentikan perangkat desa
- c. Memegang kekuasaan atas pengelolaan keuangan dan aset desa
- d. Menetapkan peraturan desa

- e. Menetapkan APBDes
- f. Melakukan pembinaan terhadap kehidupan masyarakat desa
- g. Melakukan pembinaan terhadap ketentraman dan ketertiban masyarakat desa
- h. Membina dan meningkatkan perekonomian desa untuk mewujudkan kemakmuran masyarakat desa
- i. Mengembangkan sumber pendapatan desa
- j. Mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa
- k. Mengembangkan kehidupan sosial dan budaya masyarakat desa
- l. Memanfaatkan teknologi yang tepat
- m. Mengkoordinasikan pembangunan desa dengan mengikut sertakan masyarakat dalam pembangunan atau secara partisipatif
- n. Mewakili desa di dalam dan di luar pengendalian atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang undangan
- o. Melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan peraturan perundang undangan. ( Pasal 26 ayat 2 UU No 6 tahun 2014)

Untuk pemilihan Kepala Desa dilaksanakan secara serentak di seluruh wilayah Kabupaten/Kota. kepala desa sendiri memegang jabatan selama 6 (enam) tahun terhitung dari hari di mana Kepala Desa Tersebut di lantik.

Kepala desa harus bisa bertanggung jawab kepada masyarakat desa dimana beliau di tugaskan, yang nantinya pertanggung jawabannya harus di sampaikan kepada Bupati melalui Camat yang akan di sampaikan langsung ke Bupati. Kepala Desa juga memiliki kewajiban untuk memberi laporan penyelenggaraan pemerintahan desa

kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD) untuk memberikan laporan pertanggung jawaban dan juga kepada masyarakat desa.

## B. Perangkat Desa

Perangkat Desa ialah yang bertugas membantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dan dalam melaksanakan tugasnya perangkat desa bertanggung jawab kepada Kepala Desa.

Perangkat desa sendiri terdiri dari :

a. Sekretariat desa, atau sering di sebut dengan sekretaris desa atau carik ialah satu staff yang sangat membantu Kepala Desa, sekretaris desa ini ialah jabatan di bawah Kepala Desa (Belly, 2015). Untuk sekretaris desa sendiri akan di bantu oleh beberapa staff pemerintahan desa yang terdiri dari :

- 1). Kepala Urusan Tata Usaha Umum
- 2). Kepala Urusan Keuangan
- 3). Kepala Seksi Pemerintahan
- 4). Kepala Seksi Perencanaan
- 5). Kepala Seksi Pelayanan
- 6). Kepala Seksi Kesejahteraan

b. Pelaksana Kewilayahan

Pelaksana kewilayahan ialah salah satu staff yang membantu tugas Kepala Desa di bagian kewilayahan yang ada di dalam desa tersebut.

c. Pelaksana teknis

Pelaksana teknis ialah staff pembantu Kepala Desa yang membuat dalam operasional terhadap desa dan masyarakat.

### C. Badan Permusyawaratan Desa

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan salah satu wujud dari demokrasi yang ada dalam pemerintahan desa. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) ialah pihak yang melakukan pengawasan terhadap kinerja Kepala Desa, yang juga menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa dan membahas juga menyepakati sebuah rancangan peraturan desa bersama dengan Kepala Desa.

Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di tetapkan dengan tatacara musyawarah yang diadakan pada tiap dusun masing masing. Masa jabatan untuk anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) ialah 6 (enam) tahun. Peranan dari Badan Bermusyawaratan Desa (BPD) ialah untuk menetapkan peraturan desa bersama Kepala Desa, peraturan desa disini juga di bentuk dengan sistem demokrasi dan partisipatif di mana dalam membentuk suatu peraturan untuk desa juga akan di bantu masayrakat sekitar (Emilda, 2006).

#### 2) Prinsip Prinsip Pemerintahan Desa

Menurut (Heriyanto, 2015) prinsip pemerintahan desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa menggunakan prinsip *good government* yaitu meliputi sebaagai berikut :

- a. Profesionalitas ialah meningkatkan kemampuan dalam bertindak guna memberikan pelayanan yang cepat, tepat, mudah dan biaya terjangkau.
- b. Akuntabilitas ialah meningkatkan pertanggung jawaban serta etika pemerintah dalam pengambilan keputusan di segala bidang yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat.

- c. Transparansi ialah keterbukaan dalam penyampaian maupun penyediaan informasi guna memudahkan masyarakat dalam memperoleh informasi serta menciptakan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.
- d. Pelayanan prima ialah pelayanan publik yang di selenggarakan dengan prosedur yang baik, kapasitas waktu, kejelasan tarif, akses yang mudah, kelengkapan sarana dan prasarana serta etika pelayanan yang baik.
- e. Demokrasi dan partisipasi ialah dalam setiap pengambilan keputusan harus melibatkan masyarakat di dalamnya agar keputusan yang di buat sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan tanpa sasaran.
- f. Efisiensi dan efektifitas, menjamin terselenggaranya pelayanan yang cepat, tepat, mudah dan murah dengan menggunakan sumber daya yang tersedia secara optimal dan bertanggung jawab.
- g. Supremasi hukum dan dapat di terima oleh seluruh lapisan masyarakat, mewujudkan penegakan hukum yang seadil adilnya tanpa pengecualian, menjunjung tinggi nilai Hak Asasi Manusia dan memperhatikan nilai nilai yang hidup dalam masyarakat.

### **3. Kemiskinan**

Kemiskinan ialah persoalan yang memiliki arti multimedisional yaitu persoalan terkait sosio kultur, kondisi ekonomi dan persoalan structural. Menurut badan pusat statistik dalam (Yonowo, 2006) menyatakan bahwa kemiskinan yaitu sebuah kondisi terkait nilai standar kebutuhan minimum berada di bawah garis kemiskinan (*poverty line*). Dimana garis kemiskinan ialah jumlah pengeluaran yang di perlukan oleh setiap individu untuk dapat memenuhi kebutuhan sehari hari baik itu berupa sandan, pangan

maupun papan. Kemiskinan dapat di artikan bahwa kondisi individu atau seseorang baik itu sekelompok atau individu yang tidak mampu memenuhi kebutuhan hidupnya sehari hari. Sedangkan menurut Chamber dalam (Yonowo, 2006) mengatakan bahwa kemiskinan merupakan kondisi kehidupan yang di tandai dengan harapan hidup yang rendah, lingkungan yang kumuh, kekurangan gizi, tuna aksara, wabah penyakit, dan mortalitas bayi yang tinggi. Faktor yang menyebabkan kemiskinan diantaranya pendapatan yang rendah, kelemahan fisik, isolasi dan tidak memiliki kekuatan dalam hal tawar menawar atau pun politik.

Kemiskinan dapat di jelaskan secara berbeda sesuai dari sudut pandang penglihatannya tentang kemiskinan tersebut. Cara pandang yang berbeda dapat menjelaskan bagaimana sifat, kondisi dan konteks dalam kemiskinan dapat di pahami, sebagaimana sebab kemiskinan di identifikasi, dan bagaimana mengatasi masalah kemiskinan. Kemiskinan dapat di bagi menjadi 5 bentuk menurut adit dalam (Alfana, 2014):

- a. Kemiskinan Kultural, Kemiskinan ini mengarah terhadap sikap persoalan seseorang atau masyarakat yang di sebabkan oleh factor budaya, maksudnya tidak mau berusaha untuk memperbaiki tingkat kehidupan, kehidupan yang bermalas malasan, pemborosan, tidak kreatif meskipun ada bantuan dari pihak luar.
- b. Kemiskinan Struktural, situasi ini di sebabkan oleh rendahnya akses terhadap sumber daya yang terjadi dalam suatu sosial budaya dan sosial politik yang tidak mendukung pembebasan kemiskinan, tetapi sering kali menyebabkan suburnya kemiskinan.
- c. Kemiskinan absolut, sesuatu kondisi terkait nilai standar kebutuhan minimum berada di bawah garis kemiskinan yang tidak mampu memenuhi

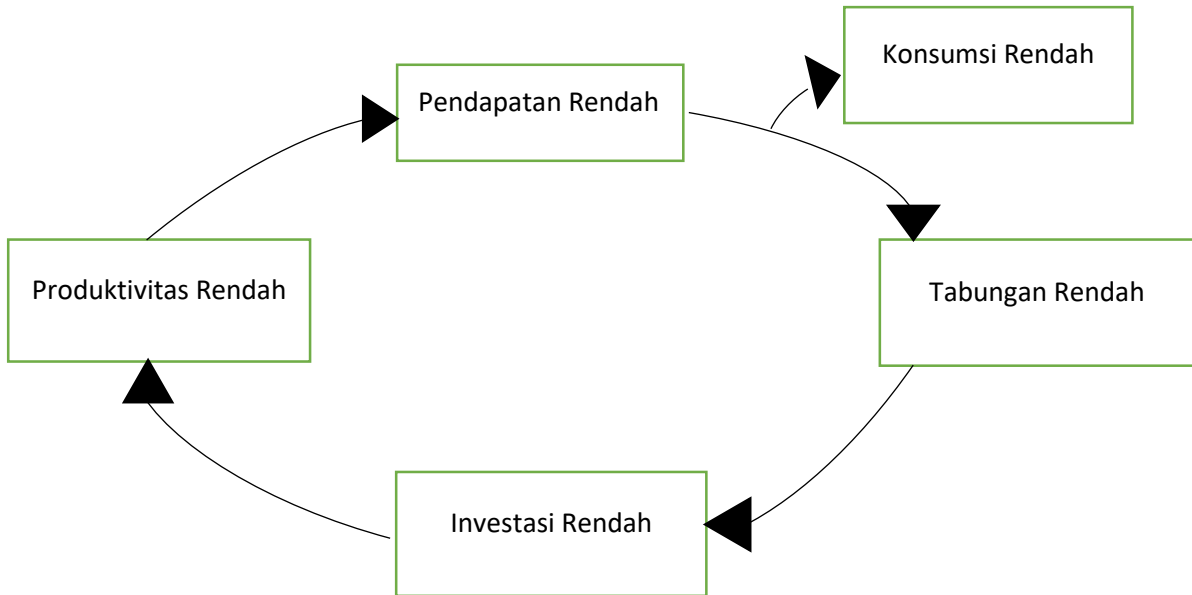
kehidupan sehari-hari seperti ( sandang, pangan, papan, pendidikan dan kesehatan ).

- d. Kemiskinan situasional atau kemiskinan natural, kemiskinan ini terjadi di daerah-daerah yang kurang menguntungkan dan oleh karena itu menjadi miskin.
- e. Kemiskinan relative, kemiskinan ini dikarenakan pengaruh kebijakan pembangunan yang belum menjangkau seluruh masyarakat, sehingga menyebabkan ketimpangan pada pendapatan yang kurang merata.

Dari definisi kemiskinan di atas dapat diketahui bahwa secara umum kemiskinan ialah kondisi seseorang atau kondisi keluarga yang berbeda dalam keadaan kekurangan sandang, pangan, papan, pendidikan dan ketidaklayakan hidup menurut standar tertentu. Kemiskinan tidak hanya didefinisikan berupa materi saja tetapi juga banyak hal yang lebih kompleks sehingga diperlukan pemahaman yang luas dalam menyerap apa yang didefinisikan sebagai kemiskinan. Di bawah ini ialah gambar lingkaran kemiskinan yang akan menjelaskan tentang bagaimana budaya dari kemiskinan yang diteruskan dari satu generasi ke generasi berikutnya :

Gambar 1.1

Lingkaran Kemiskinan



Sumber : World Bank, 2013

Berdasarkan gambar 1.1 lingkaran kemiskinan di atas dapat di ambil kesimpulan bahwa kemiskinan sangat berpengaruh dengan konsumsi rendah, pendapatan rendah, tabungan rendah, investasi rendah, produktivitas rendah hal tersebut yang menyebabkan individu atau kelompok dapat di katakan miskin.

Pada umumnya, masyarakat yang bertempat tinggal di daerah daerah pedesaan, dengan mata pencaharian petani dengan kegiatan kegiatan lainnya yang berhubungan dengan sektor ekonomi tradisional. Dengan demikian penyebab kemiskinan yang terjadi di pedesaan diantaranya sempitnya lahan pertanian yang mereka miliki atau tidak produktifitasnya lagi lahan pertanian yang di miliki. Rendahnya tingkat pendidikan sehingga berakibat pada rendahnya tingkat pengetahuan dan produktivitas dalam mengelola usaha tani, tidak ada pekerjaan sampingan, besarnya jumlah tanggungan, pendapatan yang tidak menentu sebagai akibat usaha yang sangat tergantung dengan musim serta usia tanaman yang mereka miliki sudah cukup tua



sehingga kurang produktif dalam menghasilkan produksi. Berikut adalah paparan terkait kondisi kemiskinan sebagai berikut:

a. Jumlah Tanggungan Keluarga

Jumlah tanggungan keluarga ialah jumlah anggota keluarga yang menjadi tanggungan dari rumah tangga tersebut, baik itu saudara kandung maupun saudara bukan kandung yang tinggal satu rumah tapi belum bekerja. Di negara yang berkembang seperti Indonesia, banyak yang beranggapan anak ialah investasi.

Meskipun peningkatan penghasilan di gunakan untuk menambah jumlah anak, akan tetapi lebih baik peningkatan penghasilan di gunakan untuk menambah kualitas anak melalui pendidikan. Sehingga ada kesempatan bagi anak untuk memperoleh pendapatan yang lebih baik dari pada orang tuanya di masa depan. Karena semakin banyak jumlah anggota keluarga maka semakin besar pula kebutuhan yang di penuhi. Sehingga terjadilah penerimaan pendapatan yang tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhannya dan keluarga tersebut berada dalam keadaan tidak seimbang atau miskin hal ini di katakan oleh (Zartika, 2016).

Jumlah tanggungan keluarga ini mempunyai hubungan yang erat sekali dengan masalah kemiskinan, dimana menurut (Zartika, 2016) bahwa besarnya jumlah tanggungan keluarga akan berpengaruh terhadap pendapatan di karenakan semakin banyaknya jumlah tanggungan keluarga atau jumlah anggota keluarga yang ikut makan secara tidak langsung akan memaksa tenaga kerja tersebut untuk mencari tambahan pendapatan. Sehingga bisa di simpulkan bahwa orang yang memiliki jumlah tanggungan keluarga yang cukup banyak maka jumlah penghasilan yang di butuhkan

juga akan semakin besar. Apabila penghasilan yang di butuhkan tidak cukup maka akan terjadi kemiskinan.

b. Pendidikan dan Keterampilan Rendah

Menurut (Afrida, 2003) pendidikan merupakan persyaratan untuk mengikat martabat manusia. Melalui pendidikan warga masyarakat akan mendapatkan kesempatan untuk membina kemampuannya dan mengatur kehidupan secara wajar. Perluasan kesempatan untuk memperoleh pendidikan lebih tinggi berarti membuka kesempatan ekonomis untuk mengupayakan perbaikan dan kemampuan dalam masyarakat.

Jadi pada dasarnya, sumber daya manusia yang berkualitas itu dapat menjadi tenaga kerja yang produktif. Hal ini di perkuat dengan adanya kenyataan bahwa tenaga kerja yang mempunyai pendidikan tinggi akan mampu bersaing untuk memperoleh pekerjaan yang layak sehingga di peroleh pendapatan yang layak pula. Sehingga, dengan tingkat pendidikan yang semakin tinggi maka akan bisa meningkatkan kesempatan kerja untuk mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan pendidikannya serta pendapatan yang layak untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

c. Pendapatan rendah

Pendapatan atau pun penghasilan aialah bentuk balasan karya yang di peroleh sebagai imbalan atau balasan jasa sumbangan seseorang terhadap proses produksi menurut teori fisher dalam (Nopirin, 1996), tentang konsep yang berhubungan dengan pendapatan menyebutkan bahwa permintaan uang atau transaksi tergantung dari pendapatan, makin tinggi tingkat pendapatan maka semakin tinggi pula keinginan uang kas untuk bertransaksi.

Dari kaca mata tenaga kerja, upah di anggap sebagai sumber penghasilan pokok atau di sebut *human income*. Sebagai sumber pendapatan, tenaga kerja ingin agar mencukupi. Oleh karena itu, tenaga kerja mempunyai konsep tersendiri tentang seberapa tinggi upah yang sebaiknya. Dari berbagai faktor yang di jadikan pertimbangan mereka, ada dua buah yang penting dalam kaitannya dengan pembahasan sekarang ini. Pertama, tingkat upah perlu mencukupi kebutuhan, sedangkan yang kedua seseorang biasanya tidak hanya harus mencukupi kebutuhan bagi diri sendiri, melainkan juga untuk seluruh anggota keluarga yang intinya terdiri atas anak istri. Dalam konsep *taxtended family*, kepala rumah tangga sering kali menanggung kewajiban elementasi, baik secara vertikal maupun horizontal. Namun, yang menjadi pertimbangan utama biasanya hanya keluarag inti (Arfida, 2002).

d. Kepemilikan sarana produksi yang masih sederhana dan etos kerja.

Kepemilikan sarana produksi yang masih sederhana menurut (Zartika, 2016) yaitu dalam melakukan kegiatan menggunakan alat alat yang masih sederhana dan alakadarnya.

Faktor lain menurut Kuncoro dalam (Zartika, 2016) penyebab kemiskinan di sebabkan oleh 3 faktor sebagai berikut :

- a. Secara Mikro, kemiskinan muncul dengan adanya tidak meratanya kepemilikan SDM yang mengakibatkan pendapatan yang timpang. Penduduk miskin biasanya hanya memiliki sumber daya dalam jumlah yang terbatas dan kualitas yang di miliki rendah.
- b. Kemiskinan di akibatkan dengan adanya perbedaan sumber daya manusia yang rendah yang mengakibatkan produktivitas rendah, upah rendah.

Rendahnya sumber daya manusia ini di akibatkan oleh rendahnya pendidikan, nasib yang kurang beruntung, adanya diskriminasi atau keturunan.

c. Kemiskinan juga bisa di akibatkan oleh perbedaan akses dan modal.

Untuk mengukur tingkat kemiskinan menggunakan pendekatan kemiskinan absolut ialah dengan memperhitungkan standar kebutuhan pokok seperti : sandang, pangan, pemukiman, kesehatan dan pendidikan. Kemudian karen biaya hidup di daerah kota dengan di daerah desa berbeda, maka oleh bang dunia di pakai sebagai ukuran dalam menetapkan garis kemiskinan ialah nilai US \$ 50 per kapita pertahun untuk tingkat pendapatan di desa, sedangkan US \$ 75 perkapita per tahun untuk tingkat kota pada keadaan tingkat harga tahun 1971 (Suyanto B. , 2014).

Menurut Sajogyo dalam (Hudaya, 2009) cara mengukur kemiskinan dengan pendekatan kemiskinan absolut ialah dengan memperhitungkan standar kebutuhan pokok berdasarkan atas kebutuhan beras dan gizi ( kalori dan Protein) dengan mengungkapkan masalah garis kemiskinan dan tingkat pendapatan petani. Ada tiga golongan orang miskin seperti golongan lapisan miskin yang mempunyai pendapatan perkapita pertahun dalam bentuk beras sebanyak lebih dari 360 kg tetapi kurang dari 480 kg, golongan miskin sekali yang memiliki pendapatan perkapita pertahun dalam bentuk beras sebanyak 240-360 kg, dan lapisan paling miskin yang memiliki pendapatan perkapita pertahun dalam bentuk beras sebanyak kurang dari 240 kg.

Penanggulangan kemiskinan di era otonomi daerah mengandung pelajaran tentang peluang penanggulangan kemiskinan, baik dari bentuk lama yang di susun di pemerintah pusat, mau pun pola baru hasil susunan pemerintah daerah, mungkin di sertai dukungan pemerintah pusat atau swasta di daerah (Kementrian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat,2004). Otonomi daerah memungkinkan peningkatan

penanggulangan kemiskinan karena menghadapi jarak spasial maupun temporal yang lebih dekat dengan penduduk miskin itu sendiri. Selain itu peluang tanggung jawab atas kegiatan tersebut berada di tangan pemerintahan kabupaten dan kota, serta pemerintah desa.

Berbagai kebijakan penanggulangan kemiskinan yang di keluarkan dan di implementasikan bertujuan untuk mengurangi jumlah masyarakat miskin. Penanggulangan kemiskinan pada akhirnya juga menjadi aspek pembangunan yang tidak dapat dipisahkan karena pertumbuhan ekonomi yang di capai tidak secara otomatis mengurangi angka kemiskinan tetapi malah terjadi ialah tingkat kesejahteraan yang semakin tinggi (Rubiyana, Minarsih, & Hasiholan, 2016).

Pengalaman penanggulangan kemiskinan pada masa lalu telah memperhatikan berbagai kelemahan, antara lain sebagai berikut:

1. Masih berorientasi kepada pertumbuhan marko tanpa memperhatikan aspek pemerataan.
2. Kebijakan yang bersifat sentralistik.
3. Lebih bersifat karikatif dari pada Transformatif.
4. Memposisikan masyarakat sebagai objek dari pada subjek.
5. Orientasi penanggulangan kemiskinan yang cenderung karikatif dan sesaat dari pada produktivitas yang berkelanjutan.
6. Cara pandang dan solusi yang bersifat generik terhadap permasalahan kemiskinan yang ada tanpa permasalahan kemiskinan yang ada.

Karena beragamnya sifat tantangan yang ada, maka penanganan persoalan kemiskinan harus menyentuh dasar sumber dan akar persoalan yang sesungguhnya, baik langsung mau pun tidak langsung (Bappenas, 2013).

Menurut (Tontowi, 2010) beberapa strategi telah dilakukan oleh pemerintah untuk menanggulangi tingkat kemiskinan, meskipun kebijakan telah dilakukan tidak secara langsung mengurangi penyebab kemiskinan yang paling mendasar itu sendiri.

Penanggulangan kemiskinan dilakukan dengan tujuan untuk sebagai berikut :

- a. Mendorong pertumbuhan ekonomi
- b. Mempermudah lapisan social miskin untuk memperoleh akses dalam berbagai pelayanan social seperti pendidikan, kesehatan, keluarga berencana, air bersih, sinitasi.
- c. Penyediaan kredit kredit untuk masyarakat lapisan bawah
- d. Pembangunan infrastruktur ekonomi pedesaan
- e. Pengembangan kelembagaan

Izzedin Bakhit (2001) berpendapat mengenai keberhasilan program penanggulangan kemiskinan. Agar program program penanggulangan kemiskinan dapat memberikan hasil yang nyata, tak pelak adalah bagai mana mengempur akar akar kemiskinan hingga tuntas (*attacking the roots of poverty*) (Suyanto B. , 2014). Di berbagai daerah, tidak terkecuali kabupaten Indragiri Hulu, agar perkembangan jumlah penduduk miskin terus mengalami penurunan dan upaya penanggulangan kemiskinan dapat di percepat, maka yang di butuhkan kedepannya ialah model dan upaya upaya baru yang terfokus pada proses pemberdayaan, revilitalisasi sistem setempat, pengakuan pada potensi lokal, peran aparatur pemerintahan baik di tingkat desa maupun kecamatan, peningkatan peran tim penanggulangan kemiskinan tingkat padukuhan, desa, dan kecamatan serta manajemen program yang benar benar solid di laksanakan di Desa Candirejo Kecamatan Pasir Penyus Khususnya.

Adapun model implementasi kebijakan penanggulangan kemiskinan yang menjadi acuan dalam penelitian ini ialah dengan model George Edwards dalam (Winamo, 2014) memberikan pendapat bahwa implementasi kebijakan di pengaruhi oleh empat variabel di antaranya yaitu : komunikasi, sumber daya, kecenderungan kecendungan, dan struktur birokrasi.

## **1.7. Definisi Konseptual**

### **a. Peran**

Dalam hal ini peran merupakan bagian sikap yang di ambil oleh individual atau kelompok yang ada di masyarakat dengan menekankan pada sikap yang sesuai dengan kedudukannya. Kedudukan seseorang atau kelompok yang memiliki posisi berbeda dengan masyarakat, memiliki kewajiban yang berasal dari latar belakang profesi atau dengan dorongan moral sebagai individu atau kelompok yang pro terhadap kemajuan dan kesejahteraan masyarakat. Dan peranan memiliki fungsi di pemerintahan seperti peranan fungsi pengaturan, peranan fungsi pemberdayaan, dan peranan fungsi pelayanan.

### **b. Pemerintah Desa**

Pemerintah Desa ialah penyelenggara urusan pemerintahan oleh pemerintah desa dan Badan Permuyawaratan Desa (BPD) dalam mengatur mengurus kepentingan masyarakat setempat.

### **c. Kemiskinan**

Kemiskinan ialah kondisi seseorang atau kondisi keluarga yang berada dalam kekurangan sandang, pangan, papan, pendidikan, dan ketidak layakan hidup standar tertentu. Kemiskinan tidak hanya di definisikan berupa materi saja akan tetapi banyak hal yang lebih kompleks sehingga di perlakukan pemahaman yang luas dalam menyerap apa yang di definisikan sebagai kemiskinan.

Penanggulangan kemiskinan merupakan suatu implementasi yang langsung mengarah pada sasaran kelompok masyarakat miskin dan rentan miskin dengan tujuan tujuan tertentu.

### 1.8. Definisi Operasional

Tujuan	Variabel	Indikator
Mengetahui peran pemerintah desa dalam menanggulangi kemiskinan di Desa Candirejo	Peran Pengaturan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- peraturan / kebijakan pemerintah desa untuk menanggulangi kemiskinan.</li> <li>- peran pemerintah desa dalam membuat kebijakan penanggulangan kemiskinan.</li> <li>- peran serta BPD dalam pengambilan keputusan terhadap penanggulangan kemiskinan.</li> </ul>
	Peran Pemberdayaan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- peran pemerintah desa dalam pelaksanaan pemberdayaan masyarakat dalam upaya penanggulangan kemiskinan.</li> <li>- Peran pemerintah desa dalam pemberdayaan masyarakat untuk menanggulangi kemiskinan dalam bentuk organisasi desa seperti BUMDes, PKK, dan organisasi lainnya yang ada di desa.</li> </ul>



		<ul style="list-style-type: none"> <li>- inovasi pemerintahan desa dalam penanggulangan kemiskinan.</li> <li>- keterlibatan BPD dalam proses pemberdayaan masyarakat dalam penanggulangan kemiskinan.</li> </ul>
	Peran Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- peran pemerintah desa dalam pelaksanaan pelayanan masyarakat dalam upaya penanggulangan kemiskinan.</li> <li>- proses pelayanan pemerintah desa terhadap inovasi program penanggulangan kemiskinan.</li> <li>- Peran aktor aktor yang terlibat dalam proses pelayanan yang di lakukan dalam upaya penanggulangan kemiskinan.</li> </ul>

### 1.9. Metode Penelitian

Dalam metode terdapat empat kata kunci yang perlu di perhatikan seperti dengan cara ilmiah, data, tujuan, kegunaan tertentu. Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk menciptakan data untuk tujuan dan kegunaan pada penelitian. Metode penelitian biasanya di gunakan untuk merancang pekerjaan yang akan di laksanakan sebelumnya, ketika, dan sesudah pengumpulan data.

## **1. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian ini dilaksanakan di Desa Candirejo Kecamatan Pasir Penyu Kabupaten Indragiri Hulu Provinsi Riau, yang menjadi titik pengambilan data penelitian yaitu Kantor Kepala Desa Candirejo di Kabupaten Indragiri Hulu.

## **2. Jenis Penelitian**

(Ghoni, 1997) Jenis penelitian yang digunakan ialah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Penelitian kualitatif ialah jenis penelitian yang menghasilkan penemuan-penemuan yang tidak dapat dicapai atau diperoleh dengan menggunakan prosedur-prosedur statistik atau dengan cara-cara dari kuantifikasi (pengukuran). Penelitian kualitatif lebih berupaya untuk menciptakan teori baru dari pada menguji kebenaran sebuah teori. Dalam (Martono, 2011) manfaat analisis kualitatif, menemukan arti pemahaman, maksud peneliti kualitatif berupa untuk memahami bagaimana individu memaknai atau mendefinisikan gejala social atau objek yang berada di dalam atau di luar dirinya, sehingga dalam penelitian kualitatif tidak berupaya mencari hubungan antara gejala social yang satu dengan yang lain.

Dalam penelitian ini peneliti mengambil data penelitian dengan mencermati tulisan-tulisan mengenai bagaimana peran pemerintahan Desa Candirejo dalam menanggulangi kemiskinan, serta memahami percakapan informasi, mencermati dan membandingkan hasil wawancara satu informan dengan informan lainnya untuk menjawab serangkaian pertanyaan yang di jatuhkan oleh peneliti eksplorasi data dominan memakai metode wawancara dengan orang-orang terdekat objek penelitian untuk mengeksplorasi pengalaman, pendapat serta pandangan terhadap objek penelitian yang meliputi pengalaman informasi selama menjadi pareratur Pemerintahan Desa Candirejo. Jadi dapat disimpulkan, penelitian dengan metode

tersebut dapat menghasilkan satu data deskriptif mengenai bagai mana peran pemerintahan Desa Candirejo dalam menanggulangi kemiskinan.

### **3. Teknik Pengumpulan data**

(Sugiono, 2015) menyatakan bahwa teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian ialah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang di tetapkan penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data yaitu :

#### **a. Studi Kepustakaan**

Metode pengumpulan data dengan studi kepustakaan merupakan teknik pengumpulan data yang di lakukan sebagai sumber data penelitian dengan menelaah dan menganalisis data data sekunder dari laporan penelitian, jurnal, buku, koran, *website*, mau pun berbagai dokumentasi lainnya yang berhubungan tentang peran pemerintah dalam menanggulangi kemiskinan.

#### **b. Wawancara**

Wawancara ialah percakapan dengan tujuan tertentu. Percakapan tersebut dilakukan oleh kedua pihak, yaitu pihak pewawancara (interviewer) yang memberikan pertanyaan dan terwawancara (interviewee) yang memberikan tanggapan atas pertanyaan yang di berikan (Moleong, 2017). Wawancara dalam penelitian ini merupakan pihak pihak yang sudah di tetapkan menjadi informan sehingga bisa di jadikan bahan acuan dalam penulisan. Informan yang di maksud dalam penelitian ini berasal dari aparaturnya desa, karena berkaitan dengan peran pemerintah desa dalam menanggulangi kemiskinan

c. Dokumentasi

Dokumentasi ialah sebuah catatan peristiwa yang telah berlalu. Dokumentasi dalam hal ini bisa berbentuk tulisan, gambar ataupun karya karya monumental dari seseorang. Studi dokumentasi ini di jadikan sebagai pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara pada penelitian kualitatif (Sugiyono, 2016). Dokumentasi dalam penelitian ini meliputi gambaran umum wilayah Desa Candirejo, Struktur organisasi kantor desa, laporan akuntabilitas instansi pemerintah desa, jumlah pegawai dari kantor pemerintah desa.

#### **4. Sumber Data**

Ada dua jenis data yang di gunakan dalam penelitian ini yaitu data primer dan data sekunder .

a. Data Primer

Penelitian ini menggunakan data primer yang di dapat melalui kegiatan observasi terhadap lokasi penelitian, kegiatan wawancara mendalam dan beberapa dokumentasi yang berkaitan langsung dengan penelitian.

Ada pun data primer yang di maksud dalam penelitian ini ialah pendapat para informan yang di anggap ada relevansi dengan tema penelitian ini antara lain mewawancarai Kepala seksi kemasyarakatan dan aparatur Desa Candirejo.

b. Data Sekunder

Data Sekunder merupakan data pendukung yang akan di gunakan untuk melengkapi data primer. Data sekunder di peroleh dari buku buku, jurnal, arsip, peraturan perundang undangan, media massa, penelitian terdahulu

yang berhubungan dengan peran aparatur pemerintah dalam menanggulangi kemiskinan. Data sekunder dalam penelitian ini sebagai berikut:

- a. Gambaran umum wilayah Desa Candirejo
- b. Profil Kantor Desa Candirejo. Profil kantor desa yang di maksud untuk mengetahui gambaran dan kinerja dari aparatur pemerintah desa dalam menanggulangi kemiskinan.
- c. Data Warga Miskin (GAKIN) dan Rentan Miskin
- d. RPJMDes Desa Candirejo

## **5. Analisi Data**

Analisis data yang di laksanakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Data kualitatif di peroleh dari data *reduction*, dan *display*, dan data *conclusion drawing / verification* Sirnayanti dalam (Sugiyono, 2016). Reduksi data ialah proses pemilihan, pemusatan perhatian, pada penyerdehanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan.. Proses ini berlangsung terus menerus selama penelitian ini di kerjakan. Analisi data kualitatif ini di maksud untuk menjawab rumusan masalah mengenai peran aparaturn pemerintahan Desa Candirejo dalam menanggulangi kemiskinan pada tahun 2016-2017.

Setelah menganalisi data kemudian di lanjutkan dengan keabsahan data kualitatif yaitu dengan cara triangulasi. Triangulasi dalam penelitian ini ialah dengan membandingkan informasi dari informan yang satu dengan informan yang lain, misal nya pada pegawai aparatur desa satu dengan pegawai aparatur desa yang lain.